

KEBIJAKAN EKONOMI HIJAU DI SULAWESI SELATAN

GREEN ECONOMIC POLICY IN SOUTH SULAWESI

Fahrissal Husain¹, Roslianah²

¹Institut Turatea Indonesia ²Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi Selatan
Email: fahrissal.husain@gmail.com

ABSTRAK

Indeks Ekonomi Hijau merupakan suatu proses *measurement* evaluasi pencapaian dan transisi kinerja Indonesia menuju ekonomi hijau. Kebijakan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam. Ekonomi hijau yang mempunyai prinsip dasar yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, melindungi kualitas perekonomian, serta daya dukung lingkungan hidup. Green Economy Index (GEI) Indeks Ekonomi Hijau Indonesia mempunyai 15 indikator yang mencakup tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam implementasi ekonomi hijau di Sulawesi Selatan, kebijakan yang akan diterapkan adalah mengelola perubahan lahan dengan meningkatkan kemampuan bagi para petani dengan teknologi pertanian menjaga perubahan iklim atau Climate Smart Agriculture. Jasa lingkungan berupa bantuan atau insentif kepada para petani yang menanam tanaman dengan tetap menjaga kelestarian lahannya atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup. Mengembangkan sumber daya alam secara hilirisasi kebijakan nasional dengan teknologi yang tidak mendegradasi lingkungan tempat masyarakat sekitar bergantung kepada alam, serta dapat mengalokasikan nilai tambah yang tinggi bagi petani.

Kata kunci: Ekonomi Hijau, Keberlanjutan, Kebijakan Pertanian, Hilirisasi, Nilai Tambah

ABSTRACT

The Green Economy Index is a measurement process for evaluating Indonesia's achievements and performance transition towards a green economy. Economic transformation policy by adopting the concept of a green economy which is able to synergize economic growth with limited natural resources. A green economy has basic principles, namely creating relatively high economic growth while increasing welfare for society, protecting the quality of the economy and the carrying capacity of the environment. Green Economy Index (GEI) The Indonesian Green Economy Index has 15 indicators covering three pillars, namely economic, social and environmental. In implementing the green economy in South Sulawesi, the policy that will be implemented is managing land change by increasing the capabilities of farmers with agricultural technology to protect against climate change or Climate Smart Agriculture. Environmental services in the form of assistance or incentives to farmers who grow crops while preserving their land or contributing to improving the quality of the environment. Developing natural resources downstream of national policies with technology that does not degrade the environment where local communities depend on nature, and can allocate high added value for farmers.

Key words: Green Economy, Sustainability, Agricultural Policy, Downstream, Added Value

Introduction

Konsep ekonomi hijau mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan sosial serta mengurangi risiko kerusakan pada lingkungan. Program Pertumbuhan Hijau di Indonesia diprakarsai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan pada tahun 2013, menganut prinsip-prinsip perencanaan nasional dengan melestarikan modal yang bersumber dari alam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan konsep *sustainability*, membangun perekonomian lokal secara menyeluruh dan bijaksana. Lima tujuan utama Pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia adalah: (1) Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan *fairness* (3) *Resilience* ekonomi, sosial dan lingkungan; (4) Ekosistem *healthy* dan produktif dalam produksi jasa ekosistem dan (5) Mengurangi efek emisi gas rumah kaca. Selanjutnya indikator makro diusulkan sebagai ukuran dari setiap tujuan nasional.

Pemerintah Indonesia juga telah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam rencana pembangunan rancangan RPJPN menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu arah kebijakan utama dalam transformasi ekonomi adalah melalui penerapan ekonomi hijau. Indeks Ekonomi Hijau merupakan tolak ukur menggunakan peningkatan investasi ramah lingkungan, pengelolaan aset berkelanjutan, dan alat untuk menilai pencapaian dan kinerja transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Ekonomi hijau sebagai prinsip dasar mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga kualitas perekonomian dan *carryng capacity* lingkungan hidup. Indeks Ekonomi Hijau yang diterbitkan oleh Bappenas merupakan ukuran untuk menilai pencapaian dan efektivitas transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Terciptanya infrastruktur sebagai bagian transisi yang adil dan terjangkau, serta penguatan sumber daya

manusia. GEI Indonesia memiliki lima belas indikator yang melingkupi tiga pilar yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup, sebagai cerminan pembangunan ekonomi hijau. Fokusnya pada peningkatan investasi ramah lingkungan, pengelolaan aset dan infrastruktur berkelanjutan, memastikan transisi pembangunan yang adil dan terjangkau, serta memperkuat *human resources*.

Pembangunan hijau dalam operasionalnya cenderung berbeda dengan pembangunan berkelanjutan, dimana pembangunan hijau lebih mengutamakan kelestarian lingkungan dibandingkan aspek ekonomi dan budaya, Makmun (2016:4). Makmun mengibaratkan pembangunan ekonomi hijau sebagai membangun fasilitas pembuangan limbah yang canggih memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi dan sulit dipelihara di wilayah-wilayah dengan sumber daya keuangan yang terbatas. Oleh sebab itu diperlukan terobosan pembangunan berkelanjutan tanpa menggunakan biaya operasional yang tinggi.

Permasalahan

Pencapaian nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan sebesar 60,38. Kategori nilai ini sangat dipengaruhi oleh pilar ekonomi yang menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mempengaruhi kualitas dan *carryng capacity* lingkungan hidup. Implementasi ekonomi hijau yang belum optimal ditunjukkan oleh kolom lingkungan hidup dengan total skor terendah. Kondisi real ini disebabkan oleh beberapa sebab yaitu:

1. *Konversi* lahan dan hutan yang masih relatif tinggi. *Konversi* lahan menjadi pertanian (misalnya pertanian dan perkebunan *monokultur*, proses penambangan dan perumahan/pemukiman) mempunyai kontribusi signifikan terhadap berkurangnya

tutupan pada area lahan hutan. Pendistribusian lahan untuk lahan budidaya belum bisa diimbangi dengan konservasi kawasan area yang dilindungi dan area lahan kritis;

2. *Kerentanan* pada produksi khususnya komoditas unggulan sebagai akibat *climate change*. *Challenge* pilar Ekonomi berfokus pada mengembangkan produk dengan berbasiskan lahan unggulan yang berkelanjutan, rendah emisi pencemaran, dan tahan terhadap iklim sebagai lokomotif ekonomi hijau. *Expansion* produksi barang-barang berkualitas tinggi, relatif masih kurang memperhatikan areal lahan budidaya yang cocok agar tidak menimbulkan risiko bencana alam bagi lingkungan sekitar;
3. Proses *Hilirisasi* sektor-sektor perekonomian yang berbasiskan area lahan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan masih terbilang sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh analisis keterkaitan *forward* dan *backward*. Hilirisasi terhadap barang unggulan yang dilakukan terus menerus masih belum berkelanjutan, serta tidak memperhitungkan *impact* dari perubahan iklim.

Kebijakan integrasi pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025-2045, yang didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia dan Global Affairs Canada melalui Proyek Sustainable Landscapes For Climate-Resilient Livelihoods In Indonesia (Land4Lives) untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) Provinsi Sulawesi Selatan.

METHOD

Metode yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini yaitu melalui pendekatan

model *deskriptif kualitatif*, dimana proses pengumpulan data dan informasi diperoleh melalui *study literatur* pada beberapa dokumen perencanaan, jurnal, peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

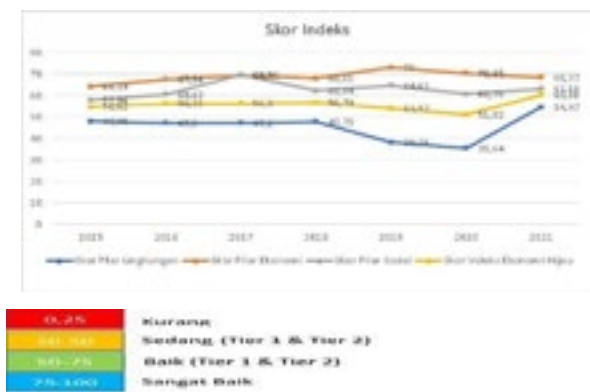
Kondisi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat peluang yang perlu dikenali dan ditindaklanjuti, implementasi pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan hadir untuk memperhatikan dan menangani beberapa tantangan yang kompleks untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau secara efektif di Sulawesi Selatan. dari tantangan dan peluang dirumuskan harapan dan hasil.

RESULTS AND DISCUSSION

Indeks Ekonomi Hijau yang dicanangkan oleh Bappenas sebagai ukuran dalam menilai pencapaian dan efektivitas model transisi Indonesia menuju ekonomi hijau. Prinsip dasar ekonomi hijau dengan menciptakan *economic growth* yang tinggi dengan tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi kualitas ekonomi yang tinggi, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, fokus pada peningkatan *green investment*, pengelolaan aset berkelanjutan dan menjamin infrastruktur yang adil dan terjangkau. Pada masa transisi, dan penguatan sumber daya manusia. Tiga pilar pada GEI yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. Pilar ekonomi yang terdiri dari enam indikator utama, yaitu meliputi intensitas emisi, intensitas energi, dan produk domestik bruto (PDB) per kapita. Pilar sosial meliputi empat indikator utama, yaitu pengangguran, kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pilar lingkungan hidup mencakup lima indikator utama, yaitu tutupan lahan, degradasi pada lahan gambut, pengurangan emisi, pengelolaan limbah, dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

Indeks ini berskala 0-100, dimana apabila nilainya mendekati poin 100 maka indeks tersebut semakin mendekati sangat baik. Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Sulawesi Selatan sendiri berada pada level baik. Dengan kata lain, capaian efektifitas transformasi ekonomi Sulawesi Selatan menuju ekonomi hijau semakin membaik (2016-2021). Saat ini nilai indeks ekonomi hijau Sulawesi Selatan berada pada poin 60,38. Nilai ini besar dipengaruhi oleh pilar ekonomi. Nilai indikator intensitas emisi dan intensitas energi final merupakan indikator yang paling tinggi pengaruhnya terhadap pilar ekonomi Sulawesi Selatan, dan diantara provinsi di pulau Sulawesi, capaian indeks ekonomi hijau Sulawesi Selatan merupakan capaian tertinggi diantara provinsi lainnya.

Gambar 1. Indeks ekonomi hijau provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2021.



Sumber data: Evaluasi RPJPD (2005 – 2025)

Perolehan Nilai Indeks Ekonomi Hijau di daerah Sulawesi Selatan cenderung meningkat pada periode tahun 2015 ke tahun 2018, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 hingga mencapai skor indeks sebesar 60,38 poin. Di tingkat daerah, kinerja Indeks Ekonomi Hijau (GEI) Sulawesi Selatan mengalami perbaikan, namun perkembangannya masih sama dengan Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah, namun dibandingkan dengan Sulawesi Barat, perolehan

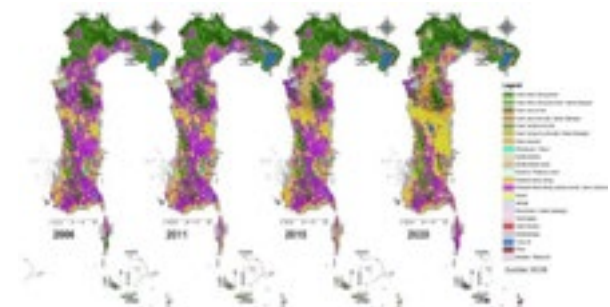
Sulawesi Selatan lebih baik. Pada tingkat nasional terkhusus pada rentang perodesasi tahun 2015 hingga periode tahun 2018, pencapaian Sulawesi Selatan masih relatif lebih tinggi dibandingkan GEI Indonesia, walaupun mengalami penurunan namun setelahnya segera bangkit kembali pada periode tahun 2021 dan melampaui capaian rata-rata nasional.

Gambar 2. Tren indeks ekonomi hijau provinsi tahun 2015-2021 ekoregion Sulawesi



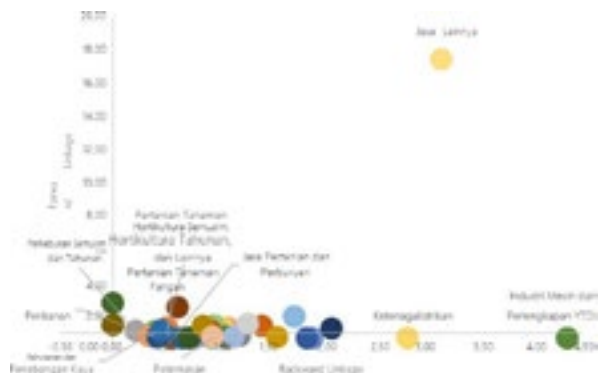
Sumber data: Indeks Ekonomi Hijau Provinsi: Capaian dan Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021.

Gambar 3. Perubahan tutupan lahan Sulawesi Selatan 2006-2020



Sumber data: KLHK 2023

Gambar 4. Analisis forward dan backward linkage di Sulawesi Selatan



Sumber : KLHS RPJPD Sulawesi Selatan 2025-2045.

Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang potensial. Iklim dan bentang lahan yang mendukung menjadikan sektor industri pengolahan dan pertanian sebagai penyumbang utama PDRB (setelah pertambangan) dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,56% dan 16,80%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja terbesar yaitu 120.084 orang atau 62,25% dari total penyerapan (BPS, 2021).

PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar 65,6 juta, masih berada di bawah rerata nasional yang sebesar 71 juta (BPS, 2022). Di Pulau Sulawesi, Sulawesi Selatan menempati urutan kedua setelah Sulawesi Tengah. Secara nasional, Sulawesi Selatan memegang peranan penting di Kawasan Timur Indonesia sebagai penghubung transportasi dan distribusi dengan keberadaan bandar udara dan pelabuhan besar. Posisi yang strategis ini menjadi keunggulan secara kewilayahan dalam pengembangan ekonomi dan distribusi barang serta jasa.

Tiga sektor tertinggi Provinsi Sulawesi Selatan masih bersumber dari sektor berbasis lahan yaitu pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian. Dalam lima tahun terakhir, tiga sektor utama penyumbang PDRB ini tidak mengalami pergeseran meskipun laju

pertumbuhannya terlihat cenderung lebih kecil dibandingkan sektor non-lahan. Bila dilihat lebih jauh berdasarkan rerata angka pertumbuhan, pada sektor pengadaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta sektor pengelolaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial masih berada pada posisi yang paling diatas.

Pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan memberikan sumbangan dan kontribusi sebesar 16,80% poin pada periode tahun 2021 dengan rerata pertumbuhan selama 5 tahun terakhir sebesar 2,68% poin. Meskipun kontribusinya terhadap PDRB yang relatif besar, keterkaitan sektor pertanian dengan sektor lainnya masih cenderung rendah. Dengan kata lain, sektor pertanian masih belum menjadi input bagi pengembangan sektor lain (pengolahan, hilirisasi) maupun memanfaatkan sektor lain (input pertanian seperti pupuk, bibit, benih). Sedangkan industri pengolahan yang sumbangannya juga signifikan pada PDRB (sebesar 18,56% poin) diindikasikan juga memperoleh sebagian besar bahan baku dari luar wilayah Sulawesi Selatan.

Selama periode satu dekade, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan PDRB yang menurun. Selama periode pandemi *new normal* 2019 dan 2020, pada sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian menunjukkan angka *contraction* yang relatif paling besar. Sedangkan sub sektor perikanan, meskipun sempat mengalami penurunan, menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir Luas area kelas tutupan lahan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan sejak periode tahun 2000-2015 terus menurun, sekitar 68 ribu hektare. Selama periode tersebut, Pemerintah Sulawesi Selatan telah memiliki berbagai program dan kegiatan untuk dapat mempertahankan luas hutan, sehingga berdampak pada penurunan hutan pada periode tahun 2000-2015 cukup kecil, dibawah 1% per tahun. Pada periode tahun 2018-2020 luas

tutupan lahan hutan kembali meningkat sekitar 39 ribu hektare.

Perubahan penggunaan lahan juga telah mengakibatkan munculnya *degradation* area lahan hutan dan area lahan kritis. Lahan kritis sebagai dampak kegiatan alih fungsi lahan di daerah kawasan hulu sungai serta kawasan DAS dapat menimbulkan sedimentasi. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis masih belum dilakukan secara optimal pada periode tahun 2015-2019, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengurangi luas lahan kritis secara signifikan pada periode yang akan datang.

Beberapa area tutupan hutan di Provinsi Sulawesi Selatan juga terletak pada ekosistem *karst* yang memerlukan pengelolaan kawasan yang spesifik. Hal ini juga dapat menjadi potensi pariwisata alam yang menakjubkan, termasuk keindahan lansekap, pegunungan, dan keanekaragaman hayati yang unik. Pariwisata alam dan ekowisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian lokal dan menghasilkan lapangan kerja. Pelestarian hutan yang baik menjadi kunci dalam mempertahankan daya tarik pariwisata alam dan menjaga kelestarian ekosistem yang menarik wisatawan. Selain itu hutan di Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk spesies endemik yang langka dan terancam punah.

Kondisi iklim di Sulawesi Selatan sebagian besar didominasi oleh curah hujan sepanjang tahun, pengaruh El Niño cenderung tidak terlalu dirasakan kecuali di beberapa kabupaten pesisir seperti Bone dan Wajo. Dengan luas wilayah sekitar 4,67 juta hektar, Sulawesi Selatan memiliki sumber daya alam yang potensial. Iklim dan bentang lahan yang mendukung menjadikan sektor industri pengolahan dan pertanian sebagai penyumbang utama PDRB (setelah pertambangan) dengan kontribusi masing-masing sebesar 18,56% dan 16,80%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat dengan penyerapan tenaga kerja

terbesar yaitu 120.084 orang atau 62,25% dari total penyerapan (BPS, 2021).

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ditopang oleh adanya beberapa komoditas unggulan Sulawesi Selatan yang mendorong perekonomian di daerah. Beberapa di antaranya seperti rumput laut, padi, jagung dan kakao memiliki konsentrasi produksi yang sangat tinggi di Sulawesi Selatan, bahkan terhadap rata-rata nasional. Perlu diperhatikan bahwa pertumbuhan komoditas unggulan ini memerlukan luasan lahan yang besar, karena pengembangan historis cenderung berorientasi pada strategi ekspansi dibandingkan intensifikasi dan hilirisasi. Hal ini didukung dengan analisis *forward linkage* untuk pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih rendah.

Peluang dan Tantangan Peluang

Beberapa *opportunity* perlu ditemukan dan ditindaklanjuti sebagai upaya nyata pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Hijau secara lebih efektif. Sulawesi Selatan mempunyai modal dasar yang sangat besar dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai konsep Ekonomi Hijau.

Komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan program integrasi dengan konsep *low* karbon ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2019-2024. Karena pentingnya konsep tersebut dapat segera direalisasikan di Sulawesi Selatan.

Kemitraan berbagai pihak untuk pembangunan berkelanjutan

Sulawesi Selatan telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kemitraan yang

dibentuk antara berbagai pihak, antara lain sektor *government*, sektor *private*, dan *local communities*. Kolaborasi dilakukan dalam berbagai proyek pembangunan, termasuk di dalamnya program *infrastructure*, *education*, dan *environment*. Beberapa kelompok kerja dan forum pemangku kepentingan telah dibentuk, antara lain, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Kelompok Kerja Perhutanan Sosial, dan Kelompok Kerja Pertumbuhan Hijau. Partisipasi yang aktif dari berbagai macam sektor ini menciptakan sinergitas yang kuat di dalam mencapai keberlanjutan. Berbagai kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat khususnya yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun kerjasama diantara ketiganya. Kegiatan pemberdayaan tersebut ada yang bersifat sektoral seperti pertanian, perikanan dan perkebunan, ada pula yang bersifat regional dan ada pula yang berbasis modernitas (perkotaan, pedesaan dan pinggiran kota), Roslianah (2003: 64).

Komoditas unggulan pada sektor pertanian dan perkebunan, sebagai salah satu sektor *strategic economy*

Sektor pertanian dan perkebunan di Sulawesi Selatan menjadi suatu komoditas andalan pembangunan sektor perekonomian daerah. Produk pertanian seperti kelapa, coklat dan kopi telah menjadi produk yang telah di ekspor ke mancanegara. Komoditi ini sangat penting, serta memberikan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pemerintah akan meningkatkan peran serta dan *support* untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan pemasaran produk-produk pertanian agar sektor tersebut tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Lokasi strategis untuk *marketing* dan *distribution* komoditas Lokal

Provinsi Sulawesi Selatan berada posisi yang cukup strategis karena berada di ujung selatan pulau Sulawesi, dan menjadi pintu *gateway* Indonesia timur. Berbagai komoditas dimiliki Sulawesi Selatan, serta keberadaan pelabuhan laut dan bandar udara untuk tujuan ekspor baik tujuan pengantarpulauan maupun tujuan luar negeri. Sulawesi Selatan bisa mengoptimalkan potensinya maritim dan pesisirnya. Kini Sulawesi Selatan telah memiliki pelabuhan laut Soekarno-Hatta dan Makassar New Port (MNP) untuk akses tol laut. Terminal peti kemas di MNP selanjutnya diarahkan untuk lebih fokus pada aktivitas ekspor dan impor. Sedangkan aktivitas bongkar muat barang dan jasa dengan tujuan di dalam negeri akan lebih banyak dilakukan melalui Terminal Peti Kemas Makassar di pelabuhan Soekarno-Hatta.

Tantangan

Implementasi kebijakan serta aturan pertumbuhan ekonomi hijau yang diberlakukan di Sulawesi akan sangat penting artinya dengan memperhatikan dan menangani beberapa potensi tantangan.

Tekanan akan kebutuhan pembangunan terhadap alih fungsi lahan, hutan dan kawasan pesisir laut.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, serta bertambahnya jumlah dan kepadatan penduduk mengakibatkan meningkatnya jumlah kebutuhan untuk ekspansi. Aktivitas untuk budidaya sering berdampak pada aktifitas pembukaan dan alih fungsi lahan, hutan, dan beberapa kawasan pesisir. Periode antara tahun 2006 dan 2020, Sulawesi Selatan sempat mengalami pergeseran pada penggunaan lahan yang cukup signifikan dengan pengurangan luas areal hutan sekitar 0,12% poin, peningkatan area pertanian hingga

13,6% poin dari total luas wilayah Sulawesi Selatan, dan penurunan luas areal kebun campur hingga 13,47% poin, merupakan penurunan terbesar yang pernah terjadi pada dua dekade. Beberapa pengembangan komoditas unggulan secara perlahan mengalihfungsikan beberapa ekosistem dengan biaya jasa lingkungan yang relatif cukup besar, seperti areal kawasan pesisir untuk lahan tambak dan daerah hutan untuk dijadikan lahan perkebunan *monokultur*. Besarnya emisi gas buang yang dihasilkan dari proses alih fungsi tersebut, dapat mengakibatkan tekanan pada lingkungan. Alih fungsi juga akhirnya berdampak pada meningkatnya areal lahan dan hutan yang kritis, peningkatan sedimentasi, ancaman banjir bandang pada musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau, serta degradasi keanekaragaman hayati darat dan laut di Sulawesi Selatan yang kekhasannya telah dikenal ke mancanegara.

Meningkatnya kerentanan produksi komoditas unggul akibat perubahan iklim seperti cuaca ekstrim, abrasi, banjir dan kekeringan, terhadap produktivitas sektor pertanian serta kehidupan masyarakat berbasis lahan serta pulau-pulau kecil terluar.

Pada periodisasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, wilayah Sulawesi Selatan menghadapi peningkatan jumlah frekuensi dan intensitas *nature disaster*, yang pemicunya antara lain adalah perubahan pada iklim. Kasus bencana alam yang umum terjadi seperti tanah longsor, abrasi pada pantai, angin tornado atau puting beliung, kebakaran areal hutan, dan banjir bandang, yang secara rutin tiap tahun terjadi. Adanya faktor perubahan iklim mempunyai implikasi signifikan terhadap sektor pertanian di Sulawesi Selatan, pengaruh langsung pada produksi dan keberlanjutan sektor pertanian dan sektor perkebunan, misalnya menurunnya kesuburan tanah yang sesuai untuk lahan budidaya, seperti ditemukan permasalahannya

pada budidaya produk unggulan tanaman kakao. Tantangan dan hambatan ini akan mengancam keberlanjutan ekosistem dan penghidupan masyarakat kecil, karena sektor pertanian dan sektor perkebunan memiliki peran yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan.

Peningkatan *competitiveness* komoditas unggulan dengan memperhatikan keselarasan tata guna lahan dan *inklusivitas* program pembangunan.

Superiority pada berbagai komoditas di Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi berbagai faktor, seperti kemampuan inovasi dalam menghasilkan *value added* yang besar. Walaupun ancaman dari perubahan iklim, beberapa jenis komoditas di Sulawesi Selatan tetap relatif masih unggul namun perlu ditingkatkan nilainya agar tangguh terhadap berbagai tantangan di masa depan. Kendala infrastruktur penunjang sebagai upaya peningkatan daya saing produksi, pengolahan maupun pemasaran komoditas unggulan seringkali diakibatkan oleh permasalahan geografis yang sulit terjangkau sehingga tidak menjangkau semua daerah pada sentra budidaya komoditas unggulan. Serasinya kebutuhan sektor unggulan yang berbasis pada lahan tersebut penting diintegrasikan ke dalam perencanaan tata ruang serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Inklusivitas pengembangan sentra produksi juga, masih perlu menjadi sasaran fokus yang penting dalam meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, mengatasi permasalahan regenerasi terhadap orang yang berperan pada sektor yang berbasis lahan dan mewujudkan pemerataan manfaat Sumber Daya Alam secara adil dan setara.

Berdasarkan kondisi tersebut maka peluang perlu dikenali dan ditindaklanjuti, mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan. Perhatian dan penanganan beberapa tantangan yang kompleks

untuk mencapai Pertumbuhan Ekonomi Hijau secara efektif di Sulawesi Selatan. Beberapa tantangan dan peluang dirumuskan harapan dan hasil sebagai berikut: 1. Pengendalian alih fungsi lahan, 2. Penurunan kerentanan produksi komoditas unggulan, 3. Hilirisasi sektor ekonomi berbasis lahan.

Pengendalian pada alih fungsi lahan

Pengendalian pada alih fungsi lahan ini ditujukan untuk mengurangi alih fungsi lahan dan hutan yang dilakukan dengan melaksanakan program pemberian bantuan dana bagi para petani yang melakukan budidaya tanaman pertanian dengan berupaya menjaga keberlanjutan daya dukung lahannya atau petani yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di sektor pertanian dan perkebunan melalui teknologi *climate smart agriculture*.

Penurunan kerentanan produksi komoditas unggulan

Produksi komoditas unggulan acap kali dipengaruhi oleh perubahan iklim. Tantangan pilar ekonomi pada pencapaian indeks ekonomi hijau di Sulawesi Selatan dititikberatkan pada pengembangan berbagai komoditas unggulan berbasis lahan yang berkelanjutan, rendah emisi dan resilien terhadap perubahan iklim sebagai penggerak roda ekonomi hijau. *Ekstensifikasi* produksi komoditas unggulan yang cenderung kurang memperhatikan tata ruang wilayah serta pembudidayaan yang cocok agar tidak mengakibatkan risiko bencana alam untuk daerah di sekitarnya. Penting meningkatkan komitmen dari kebijakan di sektor pertanian yang lebih mengedepankan peningkatan produktifitas pertanian yang berkelanjutan.

Hilirisasi sumberdaya alam berbasis lahan

Sulawesi Selatan mempunyai potensi pada sumberdaya alam berbasis lahan seperti

pertanian, perikanan, dan kehutanan yang sangat beragam. Faktanya bahwa hilirisasi sumber daya alam khususnya untuk komoditas unggulan belum sepenuhnya dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan pengaruh dampak perubahan iklim. Hilirisasi sumber daya alam yang berbasis lahan di Sulawesi Selatan perlu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang ramah pada lingkungan serta dapat memberikan nilai tambah produk unggulan yang tinggi bagi para petani.

CONCLUSION

Nilai Indeks Ekonomi Hijau Sulawesi Selatan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau di Indonesia. Pada periode tahun 2021 capaian GEI Sulawesi Selatan berada pada peringkat 7 dari 34 provinsi di Indonesia, dan telah berada diatas angka rata-rata nasional. Namun pada tingkat kawasan regional capaian *Green Economy Indeks* (GEI) Sulawesi Selatan masih lebih relatif rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Oleh karena itu perlu diambil kebijakan untuk optimalisasi penerapan pembangunan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan terutama peningkatan indeks pilar lingkungan untuk mengimbangi indeks pilar ekonomi dan indeks pilar sosial dan dapat berkontribusi terhadap capai penerapan ekonomi hijau secara nasional.

Rekomendasi Kebijakan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar segera menyusun aturan teknis terkait tentang upaya penerapan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan, serta selanjutnya ditindaklanjuti di tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur linkup tingkat provinsi dan Surat Keputusan Walikota/Bupati pada linkup kabupaten/kota. Dinas Pertanian Provinsi secara bersama

Dinas Pertanian Kab/Kota agar supaya memprioritaskan peningkatan kemampuan teknis petani melalui penerapan teknologi *climate change agriculture* atau pertanian *cerdas iklim*. Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota agar merumuskan kesepakatan dan menerbitkan panduan teknis, serta pemberian bantuan anggaran dan insentif bagi para petani yang melakukan budidaya tanaman baik langsung maupun tidak langsung, dengan tetap menjaga semangat keberlanjutan terhadap daya dukung lahan pertaniannya.

Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota agar mengakomodasi indikator penerapan ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan daerah dan Pembangunan rendah karbon, untuk menurunkan kerentanan produksi komoditas unggulan pengembangan komoditas unggulan berbasis lahan secara berkelanjutan, rendah *emisi* dan *resilien* terhadap perubahan iklim sebagai motor penggerak ekonomi hijau. Hilirisasi sumber daya alam berbasis lahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan sehingga memberikan *value added* produk bagi para petani, menjadi arah kebijakan pembangunan yang perlu diperhatikan baik di level provinsi dan kabupaten/kota. Untuk menkonkretkan setiap langkah operasional dilengkapi dengan *time schedule* serta pembagian peran pemangku kepentingan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar memprioritaskan penyusunan rencana induk dan *road map* pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat dijadikan acuan teknis penerapan ekonomi hijau di Sulawesi Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, 2023, Green Growth Program (GGP) in Indonesia Highlights of a Decade (2013-2023) 10th Anniversary of Green Growth Program 2013-2023, Green Growth Program, Hal. 1-6.
- Bappelitbangda Sulsel, 2023, Evaluasi RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
- Badan Pusat Statistik, 2021, Statistic Year Book of Indonesia 2021.
- Badan Pusat Statistik. 2022, Statistic Year Book of Indonesia 2022.
- EBTKE, 2023, Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi. Wujud Etalase Percepatan Transisi Energi, PLTS Terapung Cirata Bakal Resmi Beroperasi.
- Global Green Growth Institut, 2020, Green Growth Program Phase 2 (2016-2020) - Executive summary of Results, GGGI Indonesia.
- Global Green Growth Institut, 2014, KSN Mamminasata Moving Towards Green Growth, Hal. 1-12. http://greengrowth.bappenas.go.id/wp-content/uploads/2018/05/20151020212349.eCBA_2_KSN_Mamminasata_Booklet_ENGLISH.pdf
- IPB University, 2015, Estimasi Emisi Karbondioksida Equivalen (Co2-Eq) Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Bogor, Scientific Repository. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/78331?show=full>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023, Kementerian PPN/Bappenas, Low Carbon Development Indonesia Indeks Ekonomi Hijau Provinsi, Capaian & Progres Ekonomi hijau Provinsi 2015-2021 <http://greengrowth.bappenas.go.id/indonesia-luncurkan-indeks-ekonomi-hijau-untuk-mengukur-transformasi-pembangunanberkelanjutan/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2023, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka panjang Tahun 2025-2045,

Makmun, 2016, Green Economy: Konsep, Implementasi, dan Peranan Kementerian Keuangan. *Ekonomi. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan* Vol.19 No.2 (2011) Hal.1-15.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028.

Rosliah, 2023, Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pedesaan. *Jurnal Pallangga Praja* 5 (1), 63-74.

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor: SK.362/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019